

PERANG DIPONEGORO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA 1825-1830

Oleh:

Nur Laeli Zahro, Subaryana, Mardikun,

Abstrak

Perang Diponegoro terjadi akibat campur tangan Pemerintah Belanda di dalam kerajaan yang menyebabkan para pejabat kerajaan terutama Raja berada di bawah pengaruh Belanda, sehingga memberlakukan berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat seperti penerapan pajak, Abea cukai dan kerja paksa. Ditambah lagi dengan masuknya budaya Barat yang bertentangan dengan adat Jawa dan agama Islam yang mengakibatkan menurunnya nilai-nilai moral rakyat Jawa dalam berperilaku. Melihat keadaan rakyat yang mengalami penderitaan, muncul tokoh yang ingin membebaskan kerajaan dan rakyat dari pengaruh Belanda yaitu Pangeran Diponegoro. Untuk terlepas dari penderitaan tersebut tidak ada jalan lagi bagi rakyat kecuali dengan mengangkat senjata di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dalam perang, pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan pada dua tahun awal perang dengan menggunakan strategi perang Gerilya. Namun pada tiga tahun akhir peperangan, Belanda telah menemukan strategi Benteng Stelsel yang ternyata dapat melumpuhkan pertahanan pasukan Diponegoro. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk berunding, akhirnya Belanda dapat menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Akibat sikap perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Pemerintah Belanda membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Jawa di bidang Politik: kekuasaan raja berada di bawah kendali Belanda, sehingga kekuasaan raja menjadi terbatas. Hal ini membuat Belanda dengan leluasa memerintah raja untuk menerapkan kebijakan yang membawa keuntungan bagi pihak Belanda dan sebagian besar kebijakan membuat rakyat mengalami penderitaan. Di bidang sosial budaya: masuknya pengaruh Barat ke dalam kerajaan menjadikan perilaku para pejabat kerajaan bertentangan dengan adat Jawa yang merupakan warisan budaya nenek moyang orang Jawa serta agama Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa. Di bidang ekonomi: keadaan ekonomi rakyat sangat memprihatinkan karena rakyat dibebankan dengan macam-macam pajak dan berbagai kebijakan di bidang ekonomi yang memberatkan rakyat.

Kata kunci: Perang Diponegoro, Dampak, Masyarakat Jawa, 1825-1830

Latar Belakang

Kedatangan Belanda di Indonesia membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Intervensi Belanda dimulai sejak dibentuknya kongsi dagang Hindia Belanda atau sering disebut *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) tahun 1602. Kongsi dagang yang dibentuk oleh para pedagang swasta Belanda bertujuan agar tidak terjadi persaingan antarpedagang Belanda.

Meskipun hanya sebuah kongsi dagang, namun VOC diberi hak istimewa yaitu dapat melakukan perjanjian dengan raja-raja di Kerajaan yang ada di Indonesia. Sejak saat itu VOC berperan besar untuk menentukan perkembangan perdagangan dan politik di Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1987: 70).

VOC menerapkan sistem politik *divide et impera* (politik memecah belah) untuk ikut campur ke dalam masalah kerajaan-kerajaan di Indonesia (Sagimun MD, 1986: 17). Sebagian besar kerajaan di Indonesia mendapatkan pengaruh VOC. Salah satunya kerajaan Mataram di Jawa yang pada saat VOC berkuasa terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta berdasarkan perjanjian giyanti. Konflik di antara penguasa Jawa yang saling memperebutkan kekuasaan dimanfaatkan oleh VOC untuk mendapatkan keuntungan. Karena mengalami kebangkrutan VOC resmi dibubarkan. Wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Kedatangan Daendels sebagai Gubernur Jendral Belanda banyak membawa perubahan di kalangan raja-raja Jawa. Penghapusan upacara-upacara adat, para raja dijadikan hanya sebagai pegawai Belanda yang digaji. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan menerapkan kerja rodi bagi penduduk Jawa, sejalan dengan yang ditulis Syamsul Ma'arif (2014: 78), "Kedatangan Daendels ke pulau Jawa 5 Januari 1808, ibarat pagebluk (wabah) yang sangat mengerikan bagi penduduknya termasuk para penguasa Jawa". Daendels memaksa para raja untuk mengadakan perjanjian-perjanjian baru yaitu dengan penggabungan banyak daerah kerajaan ke dalam wilayah pemerintahan Belanda. Hal tersebut berdampak pada kehidupan rakyat serta wibawa penguasa di mata rakyat.

Merosotnya pengaruh raja di mata rakyat dan penderitaan rakyat yang semakin meningkat akibat kebijakan Belanda. Dampak kebijakan yang merugikan kehidupan, masyarakat tumbuh kesadaran ingin lepas dari keadaan yang serba sulit.

Perlawanan Diponegoro merupakan perang terbesar terakhir yang dihadapi pemerintahan kolonial Belanda di Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun, sejak 1825-1830 (Syamsul Ma'arif, 2014: 99). Perlawanan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah Belanda di

Jawa khususnya Kesultanan Yogya. Peraturan-peraturan yang ditetapkan sejak Kesultanan Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Belanda itulah yang membuat Pangeran Diponegoro prihatin, karena dapat menimbulkan keretakan dalam Kesultanan dengan adanya intervensi bangsa asing, perbedaan budaya atas pemerintahan, peraturan, dan nilai tradisional Kesultanan, yang kesemuanya bermuara pada kehidupan rakyat.

Perang Diponegoro berlangsung pada saat Sultan yang masih balita (Sultan HB V) bertahta di Kesultanan Yogya. Karena usia Sultan yang masih balita, maka Gubernur Belanda mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai wali sultan sampai Sultan berusia dewasa. Berbagai kebijakan yang diusulkan Pangeran Diponegoro sebagai wali Sultan kepada Gubernur Belanda selalu diacuhkan. Atas kebijakan gubernur Belanda yang sewenang-wenang, Pangeran memutuskan untuk pindah ke Tegalrejo dan memilih tidak ikut campur lagi dengan urusan Keraton (Syamsul Ma'arif, 2014: 97).

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana latar belakang terjadinya perang Diponegoro, Bagaimana sikap Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan Sultan HB V, Bagaimana dampak sikap Pangeran Diponegoro bagi kehidupan masyarakat Jawa.

Latar Belakang Terjadinya Perang Diponegoro

Kedatangan Belanda di Indonesia merupakan suatu bencana bagi kehidupan masyarakat pribumi. Salah satu wilayah yang merasakan dampak dari kedatangan Belanda adalah Pulau Jawa, dan yang menjadi bahasan adalah Kesultanan Yogyakarta masa Sultan Hamengkubuwana V. Pada masa kepemimpinan Sultan HB V yang masih balita, terjadi banyak konflik di antara anggota keluarga kerajaan yaitu antara kelompok Danurejo IV yang memihak Belanda dengan Pangeran Diponegoro yang menentang Belanda. Intervensi Belanda terhadap permasalahan di dalam kasultanan menjadi semakin kuat, di mana setelah Pangeran Diponegoro mundur dari perwalian dan memilih menetap di Tegalrejo. Mundurnya Pangeran

Diponegoro dari perwalian secara langsung memberikan kekuasaan yang semakin kuat terhadap Danurejo yang berada di bawah pengaruh Belanda.

Dengan hal ini membuat Belanda mempunyai pengaruh besar dalam mengendalikan para bangsawan terhadap kebijakan di bidang politik yang semua itu berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Di Yogyakarta, pengaruh Belanda sangat besar yang mengakibatkan perubahan besar terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan sejak Kesultanan Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Belanda khususnya pada zaman Gubernur Jendral Daendels (Syamsul Ma'arif, 2014: 78). Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro sebagai seorang bangsawan merasa prihatin, karena dapat menimbulkan keretakan dalam Kesultanan dengan adanya campur tangan bangsa asing yang bertentangan dengan nilai tradisional kesultanan dan agama Islam.

Terjadinya Perang Diponegoro disebabkan karena kekuasaan Raja semakin melemah, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan Raja yang mengakibatkan Raja berada di bawah kendali Belanda (Ricklefs, 2001: 252), adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama serta moral para bangsawan semakin merosot akibat dari masuknya budaya Barat yang semakin kuat, penderitaan rakyat sebagai akibat beban berbagai macam pajak, bea cukai dan sewa tanah (Syamsul Ma'arif, 2014: 100). Pemasangan patok sebagai tanda pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro oleh Danurejo IV atas perintah Smissaert merupakan sebab khusus yang mengawali terjadinya Perang (Muh. Yamin, 2011: 26). Setiap peristiwa/kejadian perlawanan yang terjadi, pastilah didahului oleh sebab-sebab yang dapat mengakibatkan meletusnya perlawanan tersebut. Hal-hal di atas merupakan sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perang.

Sikap Pangeran Diponegoro Terhadap Kebijakan Sultan HB V

Sultan Hamengkubuwono V dinobatkan sebagai raja pada usia 2 tahun. oleh karena itu, dalam memerintah ia dibantu oleh dewan perwalian yang beranggotakan diantaranya Pangeran Diponegoro (Sagimun, 1986: 27). Pengangkatan Raja dan bangsawan lainnya termasuk dewan perwalian adalah harus atas izin pemerintah

Belanda (Ricklefs, 2001: 252). Raja yang sudah berada di bawah pengaruh Belanda dan Danurejo IV semakin tidak berkuasa, masukan yang diberikan Pangeran Diponegoro sebagai wali kepada raja atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat selalu diacuhkan. Oleh sebab itu Pangeran Diponegoro memilih mundur dari perwalian dan menetap di Tegalrjo (Peter Carey, 2001: 32).

Dengan mundurnya Pangeran Diponegoro dari perwalian membuat Danurejo IV dengan dukungan Belanda berhasil mendominasi semua kebijakan keraton (Syamsul Ma'arif, 2014: 97). Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Danurejo IV dan Belanda setelah Pangeran Diponegoro mundur dari perwalian semakin memberatkan rakyat yang mengakibatkan Pangeran Diponegoro mengambil tindakan terakhir dengan jalan perang (Sagimun, 1986: 47).

Perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro dibantu oleh berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa, kaum bangsawan dan kaum santri. Dia sebagai seorang pangeran dan anggota dewan perwalian Sultan dapat menjalin hubungan dengan kaum bangsawan (Syamsul Ma'arif, 2014: 106). Sebagai muslim yang taat, dia dekat dengan para ulama. Banyak ulama yang membantunya dalam perang melawan Belanda (Ahmad Wahyu, 2017: 118). Sebagai seorang penduduk desa biasa, dia dapat menjalin kedekatan dengan rakyat. Hal ini dibuktikan pada saat Pangeran Diponegoro sampai di Selarong telah berdatangan para penduduk dari berbagai daerah (Muh. Yamin, 2011: 37).

Pada tahun-tahun awal perang (2 tahun awal perang), pihak Pangeran Diponegoro banyak mendapatkan kemenangan. Berkat strategi perang yang Pangeran Diponegoro gunakan yaitu taktik Gerilya (Ardian Kresna, 2011: 266-267). Namun pada tahun akhir peperangan, Belanda telah menemukan strategi Benteng Stelsel yang ternyata dapat melumpuhkan pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro (Saleh As'ad Djamhari, 2014: 69). Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro yang menyerah kepada Belanda, namun Pangeran Diponegoro tetap melakukan perlawanan meskipun hanya dibantu oleh pasukan yang tersisa (Peter Carey, 2014: 332). Belanda tidak menyerah untuk berusaha menangkap Pangeran Diponegoro. Berbagai upaya direncanakan oleh Belanda agar Pangeran Diponegoro mau menyerahkan diri. Pada akhirnya Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro

untuk melakukan perundingan di Magelang. Pada saat diadakan perundingan tersebut Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke tempat pengasingan (Muh. Yamin, 2011: 131).

Dampak Sikap Pangeran Diponegoro Bagi Kehidupan Masyarakat Jawa

Semakin kuatnya kedudukan Danurejo di kerajaan, ia memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan pribadinya dengan banyak melakukan hal-hal yang merugikan kerajaan sekaligus rakyat. Dengan meningkatkan pengaruh politiknya, patih dengan leluasa untuk memeras rakyat dan korupsi untuk memperkaya diri (Peter Carey, 2011: 615). Kedudukan dan kekuasaan raja dan bangsawan lainnya yang semula masih setara dengan pejabat Belanda menjadi berada di bawah kendali pemerintah Belanda (Sartono Kartodirdjo (1992: 163). Hal ini mengakibatkan tidak ada lagi rasa hormat orang-orang Belanda terhadap raja dan para pejabat kerajaan (Peter Carey, 2011: 516), hal ini bertentangan dengan adat keraton bahwa pemimpin/raja merupakan kepala tertinggi suatu kerajaan yang wajib dihormati.

Melihat sendiri kondisi kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan rakyat kecil, jiwa Pangeran Diponegoro terpanggil untuk memperbaiki keadaan (Syamsul Ma'arif 2014: 194). Dalam Islam sebagai seorang muslim sekaligus bangsawan berkewajiban membela hak rakyat yang mengalami ketidakadilan untuk itu diperbolehkan melakukan perlawanan dengan kekerasan (perang). Jiwa patriotisme Pangeran Diponegoro muncul untuk membela tanah air yang dicintainya dari campur tangan bangsa asing membuat ia melakukan perlawanan terhadap campur tangan Belanda di kerajaan (Syamsul Ma'arif, 2014: 194).

Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro dalam melakukan perang melawan Belanda, wilayah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Belanda yang mengakibatkan kekuasaan raja atas wilayah menjadi terbatas (Peter Carey, 2004: 1). Kekuasaan raja yang lemah membuat para pejabat Belanda semakin leluasa membawa budaya Barat ke dalam kerajaan yang bertentangan dengan agama Islam dan budaya keraton (Syamsul Ma'arif, 2014: 196). Di pihak Belanda sendiri mengalami krisis ekonomi akibat biaya perang yang sangat banyak. Untuk itu pemerintah Belanda menetapkan *cultuur stelsel* yang diharapkan dapat membawa

keuntungan untuk menutupi keuangan Negara Belanda (Koentjaraningrat, 1994: 67). Di sisi lain perekonomian rakyat menjadi semakin buruk setelah ditetapkannya *cultuur stelsel* yang mewajibkan rakyat menanam tanaman komoditi ekspor yang laku dipasaran Eropa dan pemerintah Belanda membelinya dengan harga yang murah (Sayamsul Ma'arif, 2014: 151). Dapat dibayangkan bagaimana keadaan masyarakat Jawa pasca perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro.

Simpulan

Perlawanan yang dipimpin Pangeran Diponegoro merupakan aktualisasi puncak kekecewaan rakyat atas (ketidakmampuan?) pemerintah kasultanan dari campur tangan Belanda. Akibat sikap Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Belanda dan para bangsawan yang menjadi sekutu Belanda membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Kekuatan politik kerajaan berada di bawah pengaruh Belanda yang dijalankan oleh Danurejo IV, sehingga hal ini membuat wibawa raja semakin lemah yang membuat rakyat tidak percaya lagi terhadap kesultanan. Hal ini berpengaruh pada kehidupan di bidang sosial budaya, masuknya pengaruh budaya Barat ke dalam kehidupan masyarakat Jawa yang bertentangan dengan adat Jawa dan agama Islam. Kondisi ekonomi rakyat sangat memprihatinkan karena rakyat dibebani dengan berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat. Selain masyarakat pribumi, Belanda juga merasakan dampak yang cukup merugikan karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro.

Daftar Pustaka

- Carey, P. (2004). *Asal Usul Perang Jawa*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- _____. (2011). *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 Jilid 2* (Terjemahan Parakitri T. Simbolon). Jakarta: PT. Gramedia
- _____. (2014). *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*. Jakarta: Kompas.
- Djamhari, SA. (2014). *Strategi Menjinakan Diponegoro Stelsel Benteng 1827-1830*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kresna, A. (2011). *Sejarah Panjang Mataram*. Yogyakarta: Araska.
- Ma'arif, S. (2014). *Jejak Kesaktian dan Spiritual Pangeran Diponegoro*. Yogyakarta: Araska.
- Ricklefs, MC. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terjemahan Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi.
- Sagimun, MD. (1986). *Pahlawan Diponegoro Berjuang*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sudrajad, AW. (2017). *Sejarah Penaklukan Jawa*. Yogyakarta: Sociality.
- Yamin, M. (2011). *Sejarah Peperangan Dipanegara Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.